**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Tinjauan Tentang Pemberdayaan**

Dalam praktek, pemberdayaan juga sering mengalami penyempitan makna. Pada dasarnya pemberdayaan merupakan proses yang bersifat multidimensi. Hal itu disebabkan karena ketidakberdayaan masyarakat yang mendorong digunakannya pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mendorong digunakannya pendekatan pemberdayaan juga bersifat multidimensi. Menurut Suharto (2009: 58), berpendapat bahwa:

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll.) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dalam pengertian tersebut, menurut Mardikanto dan Subianto (2012:28) pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat antara lain dalam arti:

* 1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
  2. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
  3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
  4. Terjaminnya keamanan
  5. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa-takut dan kekhawatiran

Lebih lanjut, menurut Mardikanto dan Subianto (2012:28) menyatakan bahwa:

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Menurut Rapport (Mardikanto dan Soebianto, 2012:28) Pemberdayaan merupakan upaya memberikan kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan dan kesejahteraan. Sejalan dengan itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya demi perbaikan kehidupannya.

Mardikanto dan Soebianto (2012: 56) menjelaskan bahwa Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

1. Prinsip-prinsip pemberdayaan

Menurut Mardikanto dan Subianto (2012:58), adapun prinsip-prinsip pemberdayaan sebagai berikut:

1. Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. Mengenai hal ini harus dikaji secara mendalam: apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap warga masyarakatnya, kebutuhan apa saja yang dapat di penuhi sesuai dengan tersedianya sumberdaya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapat prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu;
2. Organisasi masyarakat bawah artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan;
3. Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam. Di lain pihak, perencanaan pemberdayaan yang seragam untuk setiap wilayah sering kali akan menemui hambatan yang bersumber pada keragaman budayanya.
4. Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya.
5. Kerjasama dan partisipasi, artinya dalam pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksankan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
6. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang diterapkan. Yang dimaksud demokrasi disini, bukan terbatas pada tawar menawar tentang ilmu alternatif saja, tetepi juga dalam penggunaan metode pemberdayaan, serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat sasarannya.
7. Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja atau belajar tentang pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. Pemberdayaan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pengalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata.
8. Penggunaan metode yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi dan sosial budaya) sasarannya.
9. Kepemimpinan artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan. Dalam hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan pemberdayaannya.
10. Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.
11. Tujuan Pemberdayaan

Adapun tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Subianto (2012: 60) sebagai berikut:

1. Perbaikan Pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada : perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup
2. Perbaikan aksesibilitas

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

1. Perbaikan tindakan

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

1. Perbaikan kelembagaan

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

1. Perbaikan usaha

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

1. Perbaikan pendapatan

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

1. Perbaikan lingkungan

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

1. Perbaikan kehidupan

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

1. Perbaikan masyarakat

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

1. Indikato-indikator pemberdayaan

Dalam proses pemberdayaan, perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak, sehingga ketika proses pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari penerima manfaat perubahan yang perlu dioptimalkan. Mardikanto dan Soebianto (2012:91) mengemukakan beberapa indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan mencakup:

1. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan;
2. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan;
3. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan;
4. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program;
5. Jumlah dana yang dapat digali untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan;
6. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah;
7. Meningkat kapasitas skala partisipasi masyarakat.
8. Meningkatkan kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan taraf kehidupan;
9. Meningkatnya kemandirian masyarakat
10. **Tinjauan Tentang Narapidana**
11. Konsep tentang narapidana

Menurut Marito (2010: 2) bahwa narapidana adalah “sebutan yang diberikan kepada individu atau orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, yang dikenai pidana”.

Narapidana adalah orang-orang yang terkategori tak berdaya. Mereka merupakan korban terhadap berbagai pengaruh untuk melakukan tindakan kriminalitas dan penyimpangan dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Untuk itu mereka perlu diberdayakan melalui demokratisasi, pembangkitan ekonomi kerakyatan, keadilan dan penegakan hukum, partisipasi politik, serta program-proram pendidikan non formal.

Sesuai UU No.12 Tahun 1995 (Marito, 2010), narapidana adalah “terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Hidup menjadi narapidana bukanlah sebagai pilihan hidup yang menyenangkan, melainkan korban dari keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu. Secara psikologis mereka yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh. Sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia kriminalitas yang keras dan cenderung berpengaruh negatif bagi perkembangan pembentukan kepribadiannya.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan narapidana

Keadaan kota yang semakin padat mengundang maraknya tingkat kriminalitas, dan banyak keluarga yang bermasalah membuat kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang, kehangatan jiwa, kehilangan hak untuk bergembira, bermsyarakat, hidup merdeka atau bahkan mengakibatkan dianiaya secara batin, fisik, perlakuan seksual oleh keluarga, teman serta orang lain yang lebih dewasa. Banyak faktor yang kemudian diidentifikasikan sebagai penyebab yang mempengaruhi keberadaan dari peristiwa kriminalitas. Menurut Malsad, S,G, (2010) bahwa:

Adanya orang yang melakukan tindak kejahatan berada di kota bukanlah semata-mata karena berkembangnya sebuah kota, tetapi justru karena berkembangnya tekanan ekonomi dan rasa tidak aman sebagian warga masyarakat yang kemudian terpaksa harus mencari tempat yang diduga dapat memberikan kesempatan bagi suatu kehidupan yang lebih baik dikota.

Hal senada juga diungkapkan oleh Saparinah, S (1994: 126) ada beberapa faktor yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap timbulnya masalah kriminalitas, antara lain:

Faktor kemiskinan (struktural dan pribadi, faktor keterbatasan kesempatan kerja (faktor intern dan ekstern), faktor yang berhubungan urbanisasi dan masih ditambah lagi dengan faktor pribadi seperti tidak biasa displin, biasa hidup sesuai dengan keinginannya sendiri dan berbagai faktor lainnya. Beragam faktor tersebut yang paling dominan menjadi penyebab munculnya kriminalitas adalah faktor kondisi sosial ekonomi disamping karena adanya faktor *broken home* serta berbagai faktor lainnya.

1. **Tinjauan Tentang Program Kecakapan Hidup**

Pengertian program kecakapan hidup

Mengenai pengertian program kecakapan hidup atau pembelajaran keterampilan terdapat perbedaan pendapat namun esensinya tetap sama. Menurut Brolin (Asen:1980) bahwa keterampilan atau pendidikan kecakapan hidup adalah kontinum pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar menjadi independen dalam kehidupan. Pendapat lain mengatakan bahwa keterampilan merupakan kecakapan yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat bahagia dalam kehidupan.

Malik Fajar (2010: 25) mengatakan bahwa keterampilan adalah ”kecakapan yang dibutuhkan untuk bekerja selain kecakapan dalam bidang akademik. Sementara itu team *Broad Base Education* Depdiknas (dalam Asen: 1980) mendefinisikan bahwa keterampilan adalah ”kecakapan yang dimiliki oleh seseorang agar berani dan mau menghadapi segala permasalahan kehidupan dengan aktif dan proaktif sehingga dapat menyelesaikannya”.

Sedangkan menurut Slamet (2009: 13) mendefinisikan bahwa keterampilan adalah:

Kemampuan, kesanggupan dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia. Kecakapan tersebut mencakup mencakup segala aspek sikap perilaku manusia sebagai bekal untuk menjalankan kehidupannya.

Selanjutnya keterampilan berasal dari kata dasar “terampil” yang berarti mampu melaksanakan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1447) keterampilan diartikan “sebagai kecakapan untuk menyelesaikan tugas”. Menurut Reber (Syah Muhibbin, 1995: 118) keterampilan adalah “kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu”.

Program kecakapan hidup merupakan pendidikan yang memberikan bekal dasar dan latihan berupa keterampilan yang dilakukan secara benar kepada seseorang tentang nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan dan berguna bagi perkembangan kehidupan seseorang. Dengan demikian Program kecakapan hidup harus dapat merefleksikan kehidupan nyata dalam proses pembelajaran agar seseorang memperoleh pembelajaran hidup tersebut sehingga seseorang siap untuk hidup ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan pelaksanaan Program kecakapan hidup bervariasi disesuaikan dengan kondisi seseorang dan lingkungannya.

Pengertian keterampilan sebenarnya lebih luas dari sekedar untuk menghidupi diri sendiri. Namun persoalannya bukan sekedar keterampilan tetapi bagaimana caranya memberikan pembelajaran yang betul-betul mampu membuat seseorang mandiri dan dapat mengurus dirinya sendiri.

Konsep keterampilan dalam proses pembelajaran sebenarnya bukan hal yang baru karena memiliki pengertian luas dari sekedar untuk menghidupi diri sendiri. Namun persoalannya, bukan sekedar keterampilan tetapi bagaimana caranya memberi pendidikan yang betul-betul mampu membuat seseorang mandiri dan dapat mengurus dirinya sendiri.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengikuti program kecakapan hidup

1. Minat

Menurut Slameto (1990: 30) bahwa minat adalah ”kecenderungan yang tetap memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan yang diminati seseorang dan diperhatikan terus menerus yang disertai rasa senang”.

Berdasarkan definisi minat di atas maka dapat disimpulkan bahwa minat merupakan produk dari kemampuan psikis yang dapat membangkitkan motivasi terhadap suatu objek.

1. Bakat

Menurut Primastuti, A (2007: 16) bahwa bakat adalah ”kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang dibawa sejak lahir yang sangat membantu seseorang untuk dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan”.

Prinsip umum program kecakapan hidup

Pada umumnya Program kecakapan hidup memiliki prinsip umum yang sama, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia antara lain:

* + 1. Tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku.
    2. Tidak harus dengan mengubah kurikulum tetapi yang diperlukan adalah penyiasatan kurikulum untuk diorientasikan dan diintegrasikan kepada pengembangan kecakapan hidup.
    3. Etika-sosio-religius bangsa dapat diintegrasikan kepada pengembangan kecakapan hidup.
    4. Pembelajaran prinsip *learning to know, learning to do, learning to be,* dan *learning to live together*.
    5. Paradigma *learning to life* *and school to work* dapat dijadikan kegiatan dasar pendidikan sehingga terjadi pertautan antara pendidikan dan kehidupan nyata.
    6. Penyelenggaraan pendidikan keterampilan harus selalu diarahkan agar seseorang dapat menuju hidup sehat, dan berkualitas untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas serta memiliki akses untuk mampu memenuhi hidupnya secara layak.

Fungsi program kecakapan hidup

Fungsi program kecakapan hidup menurut *Team Broad Base Education* Depdiknas (Asen, 1980: 7) adalah:

1. Mengatulisasikan potensi seseorang sehingga dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi.
2. Memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan, lembaga sosial dan sejenisnya untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas.
3. Pemanfaatan sumber daya yang ada dimasyarakat.
4. Mengembangkan potensi manusiawi seseorang dalam menghadapi perannya dimasa mendatang.
5. Membebankan pembelajaran yang fleksibel dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dimasyarakat.
6. Membekali seseorang dengan kecakapan hidup sebagai pribadi yang mandiri.

Jenis-jenis program kecakapan hidup

Jenis-jenis program kecakapan hidup dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dan kemampuan fungsional praktis serta perubahan sikap untuk bekerja dan berusaha mandiri, membuka peluang kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan peluang yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannnya. Adapun jenis-jenis program kecakapan hidup yang diberikan adalah pembuatan bingkai foto, pembuatan kursi, pembuatan lemari, pembuatan tempat tidur, pembuatan tahu dan tempe serta menjahit.

1. **Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Alternatif Pemberdayaan Narapidana**

Salah satu bentuk penanganan para narapidana adalah melalui Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai tempat pelaksanaan kegiatan non formal. Dimana para narapidana bertemu memperoleh pengetahuan dan bekal keterampilan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pengertian Rumah Tahanan Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 Nomor 2 disebutkan bahwa “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Selain di Rumah Tahanan Negara ada juga tahanan yang ditempatkan pada cabang Rutan atau tempat tertentu seperti Karantina Imigrasi, Tempat tahanan di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan serta Bea dan Cukai yang dipergunakan sebagai tempat penahanan yang belum ditetapkan sebagai cabang Rutan.

Secara umum tujuan dibentuknya Lembaga Permasyarakatan adalah membantu para narapidana mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedangkan secara khusus, tujuan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah:

1. Membentuk kembali sikap dan perilaku narapidana yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat.
2. Mengupayakan narapidana kembali kerumah jika memungkinkan atau lembaga pengganti lainnya jika diperlukan.
3. Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi masyarakat yang produktif.

Peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan bagi program pemberdayaan narapidana sangat penting. Secara ringkas fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 antara lain:

1. Sebagai tempat pertemuan (*meeting point*) pekerja sosial bagi narapidana. Dalam hal ini sebagai tempat untuk terciptanya persahabatan dan keterbukaan antara narapidana dengan pekerja sosial dalam menentukan dan melakukan berbagai aktivitas pembinaan.
2. Pusat diagnosa dan rujukan, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat melakukan diagnose terhadap kebutuhan dan masalah narapidana serta melakukan rujukan pelayanan sosial bagi narapidana.
3. Fasilitator atau sebagai perantara narapidana dengan keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga lainnya.
4. Pusat informasi tentang narapidana.
5. Kuratif dan rehabilitatif yaitu fungsi mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial.
6. Resosialisasi, lokasi Lembaga Pemasyarakatan yang berada ditengah-tengah masyarakat merupakan salah satu upaya mengenalkan kembali norma, situasi dan kehidupan bermasyarakat bagi narapidana.
7. **Tinjauan Tentang Narapidana Dalam Konteks Pendidikan Luar Sekolah**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 2 secara jelas memaparkan tentang pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Hal ini menegaskan bahwa pembinaan terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar berada pada jalur pendidikan non formal.

Sihombing (2001: 3) mengemukakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah:

1) Usaha sadar yang diarahkan untuk menyiapkan, meningkatkan, dan mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan daya saing untuk merebut peluang yang tumbuh dan berkembang dengan mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di lingkungannya. 2) Suatu proses memanusiakan manusia untuk meningkatkan kualitas berpikir, moral dan mental sehingga mampu memahami, mengungkapkan, membebaskan dan menyesuaikan dirinya terhadap realitas yang melingkupinya.

Sedangkan menurut Made, P (1997: 20) memandang bahwa ”program pendidikan luar sekolah orientasinya lebih terarah kepada keterampilan untuk bisa menghidupi dirinya sendiri dalam program kejar usaha”.

Tampak bahwa pembelajaran keterampilan yang diberikan kepada para narapidana sebagai warga binaan merupakan program yang berada dalam jalur pendidikan luar sekolah yang menganut prinsip belajar sepanjang hayat dalam konsep pembelajaran keterampilan dengan tujuan pembentukan karakter dan jati diri sehingga mereka dapat hidup secara mandiri dengan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk berani menghadapi realitas kehidupan serta memiliki bekal untuk mengaktualisasikan dirinya dan bisa hidup secara mandiri di tengah-tengah masyarakat.

Para narapidana sebagai warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat mengaktualisasikan dirinya secara mandiri apabila mereka mampu mengikuti dengan baik berbagai jenis pembinaan dan pembelajaran keterampilan yang diberikan oleh lembaga-lembaga sosial yang melaksanakan kegiatan yang serupa.

1. **Kerangka Pikir**

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu wadah untuk melakukan pemberdayaan dan pendidikan terhadap orang-orang yang telah melanggar Undang-Undang atau pelaku tindak pidana yang mendapatkan keputusan hakim atau orang yang sedang menjalani pidananya. Narapidana diberi pemberdayaan, pendidikan, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Salah satunya dengan pemberian program kecakapan hidup atau pembelajaran keterampilan agar para narapidana mempunyai keahlian yang kelak akan berguna sebagai bekal kehidupan untuk dapat hidup mandiri setelah bebas, dapat merubah tingkah laku dan menemukan kesejahteraan hidup dengan pemuasan kebutuhan.

Berikut ini adalah skema kerangka pikir yang dapat menggambarkan tentang Pemberdayaan narapidana di Lembaga Pemasyarakat (LAPAS) Klas I Makassar:

Narapidana Lapas Klas I Makassar

Pemberdayaan

Perbaikan usaha

Pemberdayaan narapidanana dengan terciptanya perbaikan masyarakat

Program kecakapan Hidup

1. Pembuatan bingkai foto
2. Pembuatan lemari
3. Pembuatan kursi
4. Pembuatan tempat tidur
5. Pembuatan tahu dan tempe
6. Menjahit

Gambar 2.1 : Skema Kerangka Pikir